

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I B**



**PENGADILAN NEGERI BREBES
KABUPATEN BREBES, JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
BAB I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Landasan Hukum.....	4
D. Rencana Kerja	4
BAB II. METODOLOGI PENELITIAN.....	6
A. Metode Penelitian	6
B. Populasi dan Sampel.....	6
C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	6
D. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	6
E. Teknik Analisa Data	7
F. Tahapan Pelaksanaan.....	7
BAB III. INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	9
A. Profil Responden	9
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	10
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan....	20
D. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan	20
BAB IV. PENUTUP	21
A. Kesimpulan	21
B. Rekomendasi	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
7. Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Rencana Kerja

1) Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2) Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

3) Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Brebes;

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

F. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparasi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

No	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Jenis Kelamin

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang jenis kelamin, pengakses layanan di Satuan Kerja mayoritas adalah Laki-laki (84%)

Tabel 4.
Jenis Kelamin responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	84	84
2	Perempuan	16	16
Jumlah		100	100

2. Tingkat Pendidikan

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar SMA (54%)

Tabel 5.
Tingkat pendidikan responden

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
1	SD	5	5
2	SMP	21	21
3	SMA	54	54
4	D3	2	2
5	S1	15	15
6	S2	3	3
Jumlah		100	100

3. Pekerjaan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang Pekerjaan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Wiraswasta (53%)

Tabel 6.
Tingkat Pekerjaan responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1	PNS	3	3
2	TNI	5	5
3	POLRI	0	0
4	SWASTA	12	12
5	WIRASWASTA	53	53
6	LAINNYA	27	27
Jumlah		100	100

B. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

1. Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3.89**

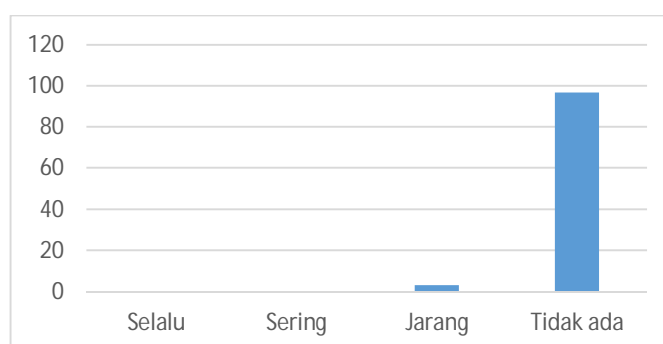
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI**

Tabel 7.
Indeks pada Manipulasi Peraturan

NO	JAWABAN	SKOR	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	1	1
3	Jarang	3	6	6
4	Tidak ada	4	93	93
Jawaban			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Tabel 8.
Indeks pada Manipulasi Peraturan



2. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3.94**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI**

Tabel 9.

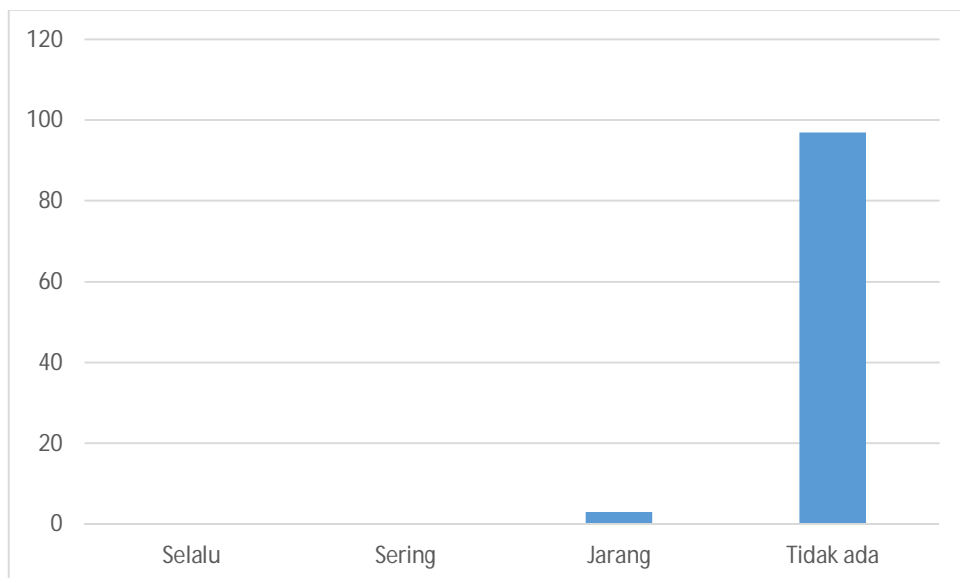
Indeks pada Manipulasi Peraturan

NO	JAWABAN	SKOR	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	6	6
4	Tidak ada	4	94	94
Jawaban			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Tabel 10.

Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan



3. Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3.94**

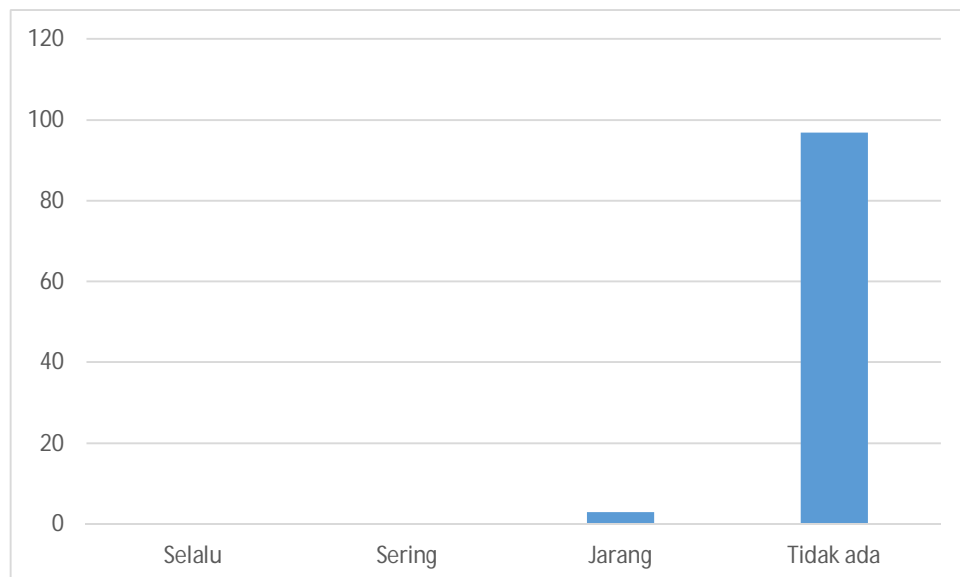
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **BERSIH DARI KORUPSI**

Tabel 11.
Indeks pada Menjual Pengaruh

NO	JAWABAN	SKOR	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	6	6
4	Tidak ada	4	94	94
Jawaban			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Tabel 12.
Indeks pada Menjual Pengaruh



4. Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3.89

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan BERSIH DARI KORUPSI

Tabel 13.

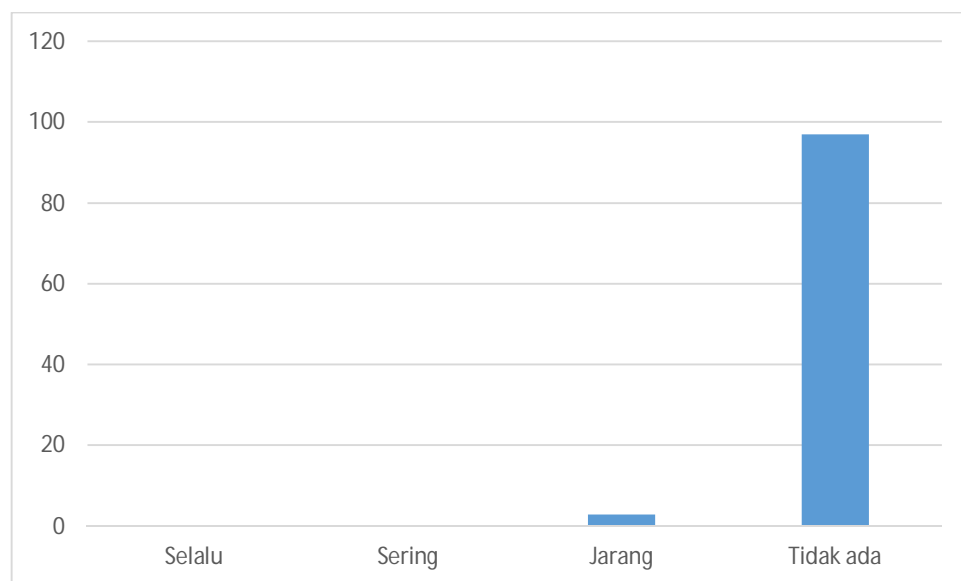
Indeks pada Transaksi Biaya

NO	JAWABAN	SKOR	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	1	1
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	7	7
4	Tidak ada	4	92	92
Jawaban			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Tabel 14.

Indeks pada Transaksi Biaya



5. Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3.92

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan BERSIH DARI KORUPSI

Tabel 15.
Indeks pada Biaya Tambahan

NO	JAWABAN	SKOR	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	8	8
4	Tidak ada	4	92	92
Jawaban			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Tabel 16.
Indeks pada Biaya Tambahan



6. Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3.86

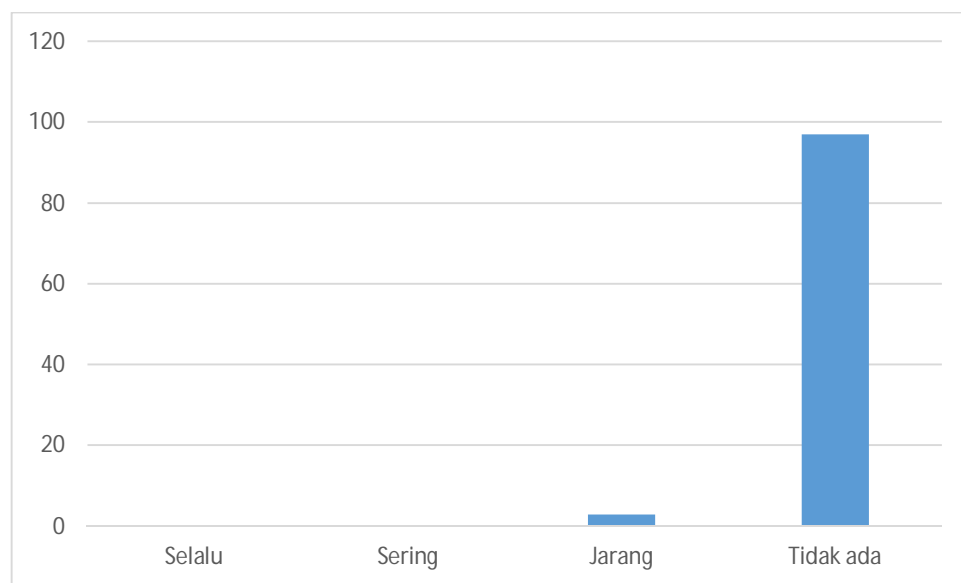
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan BERSIH DARI KORUPSI

Tabel 17.
Indeks pada Hadiah

NO	JAWABAN	SKOR	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	2	2
2	Sering	2	1	1
3	Jarang	3	6	6
4	Tidak ada	4	91	91
Jawaban			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Tabel 18.
Indeks pada Hadiah



7. Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3.93

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan BERSIH DARI KORUPSI

Tabel 19.

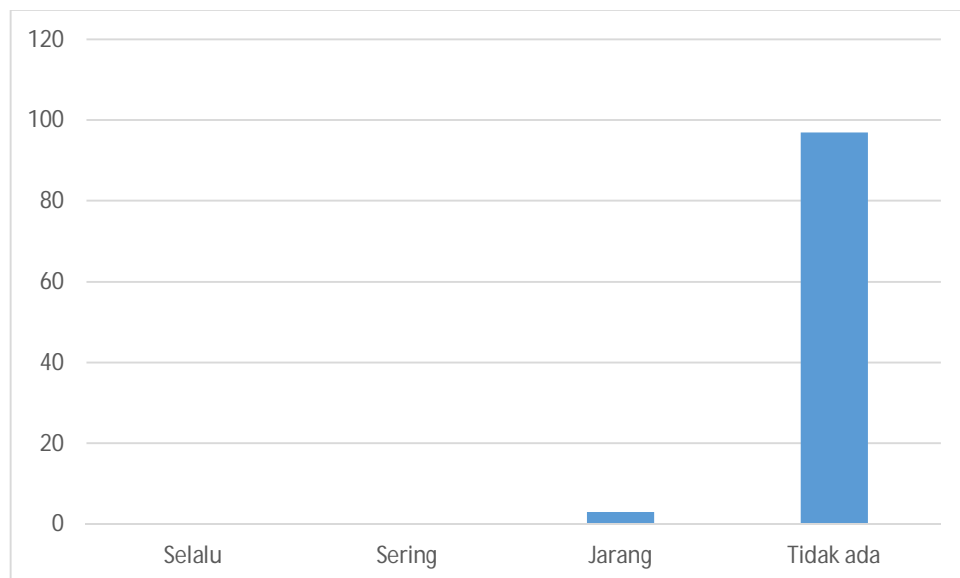
Indeks pada Transparansi Biaya

NO	JAWABAN	SKOR	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	1	1
3	Jarang	3	5	5
4	Tidak ada	4	94	94
Jawaban			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Tabel 20.

Indeks pada Transparansi Biaya



8. Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3.86

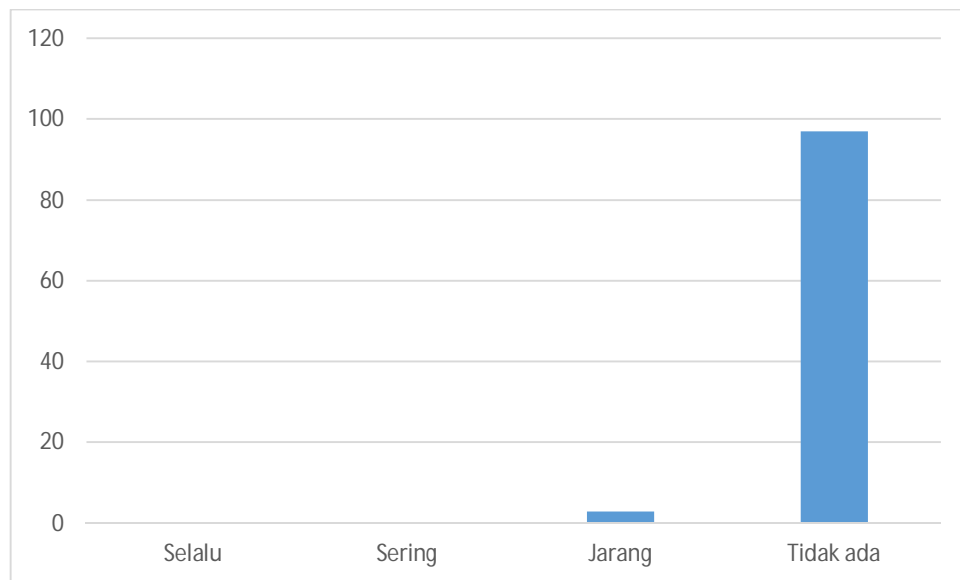
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan BERSIH DARI KORUPSI

Tabel 21.
Indeks pada Percaloan

NO	JAWABAN	SKOR	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	2	2
2	Sering	2	2	2
3	Jarang	3	4	4
4	Tidak ada	4	92	92
Jawaban			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Tabel 22.
Indeks pada Percaloan



9. Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3.89

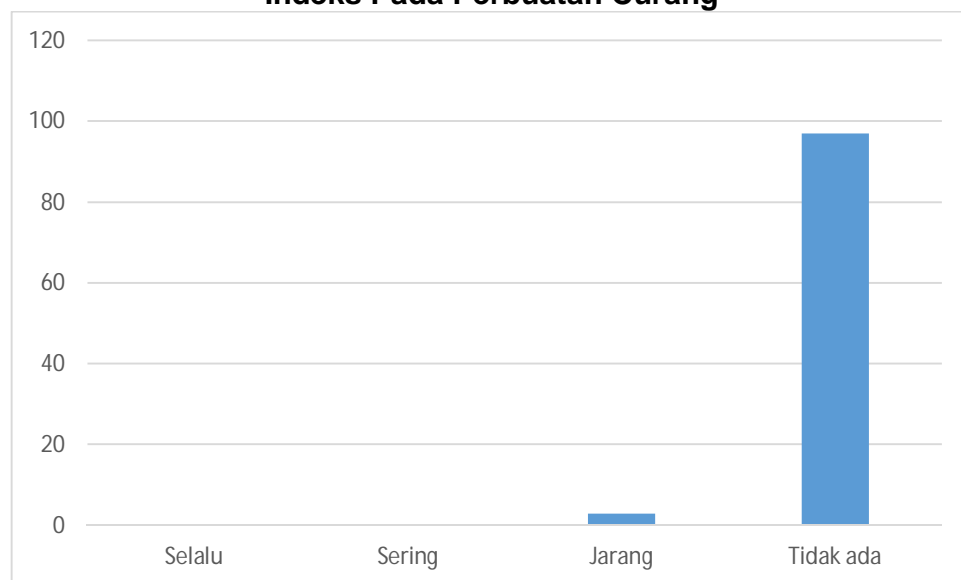
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan BERSIH DARI KORUPSI

Tabel 23.
Indeks pada Perbuatan Curang

NO	JAWABAN	SKOR	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	1	1
3	Jarang	3	9	9
4	Tidak ada	4	90	90
Jawaban			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Tabel 24.
Indeks Pada Perbuatan Curang



10. Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3.97

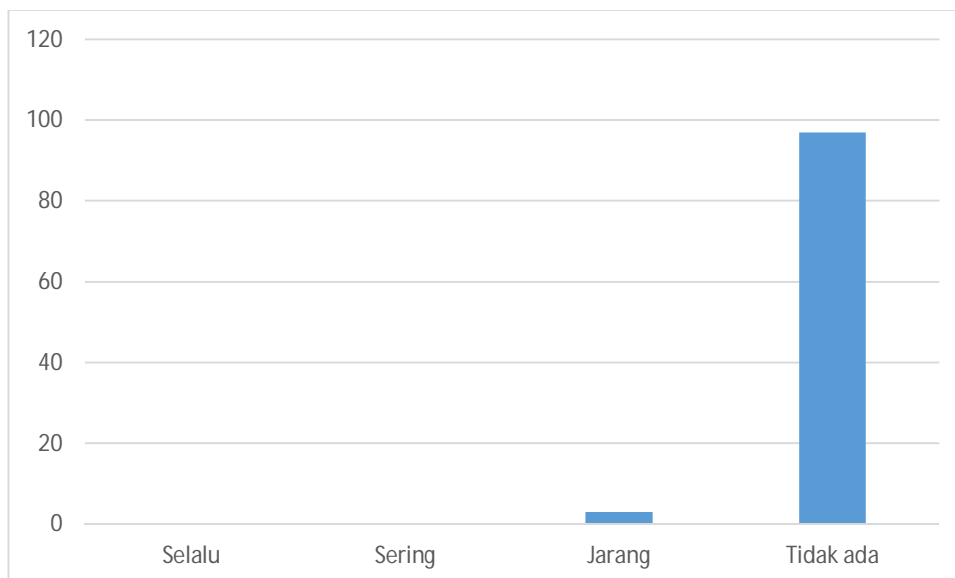
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan BERSIH DARI KORUPSI

Tabel 25.
Indeks pada Transaksi Rahasia

NO	JAWABAN	SKOR	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	3	3
4	Tidak ada	4	97	97
Jawaban			100	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Tabel 26.
Indeks pada Transaksi Rahasia



C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Brebes

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Brebes sebesar **3,91**

Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3,91**

Tabel 27.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Brebes

No	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

D. Persepsi respondent terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Brebes.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 28.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Agar lebih ditingkatkan lagi pelayanannya

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Brebes diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Brebes memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,91 **atau** masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,89
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,94
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,94
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,89
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,94
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,86
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,93
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,86
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,89
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,97

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Brebes Tahun 2019 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada BERSIH DARI KORUPSI. Namun dari sepuluh indikator tersebut menunjukkan bahwa indikator TRANSPARANSI PEMBAYARAN memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

ANALISIS DATA										
SURVEI PERSEPI KORUPSI										
PADA PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB										
No Res	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	1	4	4	3
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
9	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4
76	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4
80	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4
85	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
86	4	4	4	3	4	3	2	4	3	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	4	3	4	4	4	3	4	2	4	4
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	4	3	3	4	4	4	3	2	3	4
95	4	3	3	3	4	4	3	3	2	4

96	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah	389	394	394	389	394	386	393	386	389	397
NRR per RL	3,89	3,94	3,94	3,89	3,94	3,86	3,93	3,86	3,89	3,97
NRR tertimbang	0,389	0,394	0,394	0,389	0,394	0,386	0,393	0,386	0,389	0,397
INDEKS PERSEPSI KORUPSI									3,911	97,78

Keterangan										
RL	= Ruang Lingkup Pelayanan									
-NRR	= Nilai Rata-rata									
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat									
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang									
-**)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25									
NRR per RL	= Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuisioner yang terisi									
NRR tertimbang	= NRR per ruang lingkup x (1/10)									

Persepsi Korupsi Satuan Kerja : 3,91
Kategori: Bersih dari Korupsi

Persepsi Korupsi Satuan Kerja				
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25-43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76-42,50	43,76-62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51-3,25	62,51-91,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26-4,00	91,26-100,00	4	Bersih dari korupsi

**KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB**

Tanggal Survei : Jam Survei : 08.00 – 12.00 WIB
 13.00 – 16.30 WIB

I. PROFIL

Jenis Kelamin : L P
Pendidikan : SD SMP SMA S1 S2 S3
Pekerjaan : PNS TNI POLRI ADVOKAT WIRASWASTA/SWASTA
 LAINNYA

Jenis layanan yang diterima :

II. PENDAPAT RESPONDEN

1. Pelayanan oleh petugas tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan) a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada	2. Dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah disertai dengan adanya penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan) a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh) a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada	4. Dipersulit dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi biaya) a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada
5. Diminta untuk membayar tidak sesuai tarif resmi atau ada biaya tambahan? (Biaya tambahan) a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada	6. Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)? (hadiah) e. Selalu a. Sering b. Jarang c. Tidak ada
7. Tidak menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah melakukan pembayaran? (transparansi biaya) a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada	8. Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (Percaloan) a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada
9. Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan? (Perbuatan Curang) a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada	10. Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Satf Pengadilan di luar persidangan? (Transaksi Rahasia) a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak ada